# **BAB I**

#  **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Saat ini kita berada pada era informasi, di mana informasi memegang peranan penting dalam aspek kehidupan. Siapa yang menguasai informasi maka ia yang memiliki peluang lebih dibandingkan yang tidak memiliki pemanfaatan informasi yang optimal dapat memberikan ide yang inovatif untuk pengembangan.

Perusahaan-perusahaan dan juga instansi pemerintah harus secara cepat bereaksi terhadap masalah dan kesempatan yang tumbuh dari lingkungan modern, lingkungan modern merujuk pada kombinasi faktor sosial, legal, ekonomi, fisik dan politik yang mempengaruhi aktivitas. Lingkungan pada zaman informasi sekarang ini banyak menimbulkan tekanan-tekanan terhadap perusahaan-perusahaan ataupun instansi pemerintah.

Organisasi bisa saja menanggapi secara reaktif terhadap tekanan yang memang sudah ada, atau proaktif terhadap tekanan tekanan yang bisa di antisipasi. Tanggapan perusahaan ataupun instansi pemerintah biasanya difasilitasi dengan teknologi informasi yang dalam arti luas adalah sekumpulan komponen-komponen teknologi individual yang biasanya di organisasi oleh sistem informasi berbasis komputer (CBIS). Dalam beberapa kasus, TI adalah salah satunya solusi untuk menangani tekanan tekanan ini.

Organisasi mencari suatu implementasi yang secara signifikan dapat meningkatkan keberhasilan dan pertahanan dalam operasional organisasi. sistem seperti ini akan memberikan keuntungan strategis untuk memenuhi kebutuhan, dan meningkatkan kebutuhan strategis.

Sebagai tanggapan terhadap tekanan-tekanan yang ada banyak lembaga swasta maupun pemerintah yang menerapkan usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitasnya. Produktivitas adalah rasio antara output dan input sehingga organisasi dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan output, mengurangi biaya, meningkatkan output lebih cepat dari biaya atau kombinasi keduanya. teknologi informasi dapat digunakan secara ekstensif untuk meningkatkan produktivitas maupun kualitas. pendekatan lain yang sudah banyak digunakan sebagai peralatan peningkatan kerja organisasi adalah *Total Quality Management (TQM)* yaitu manajemen strategi pada keseluruhan elemen organisasi dengan memerhatikan kualitas.

Implementasi teknologi informasi dalam pendekatan TQM adalah menyediakan fasilitas monitoring, pengumpulan, analisis data, dan pelaporan TI juga dapat meningkatkan kecepatan inspeksi, kualitas pengujian, dan mengurangi biaya untuk melaksanakan aktivitas kendali kualitas sehingga pada akhirnya teknologi informasi dapat membantu mengatasi masalah kualitas sebelum masalah muncul.

Dalam banyak kasus dalam perusahaan dan instansi pemerintah pengambilan keputusan juga menjadi hal yang sangat penting. Pendekatan teknologi informasi juga memperkuat pekerjaan dan mempercepat kerja kolaborasi. Ini merupakan pendekatan yang memberikan otoritas kepada pekerja untuk bertindak dan mengambil keputusan secara mandiri. manajemen memberikan pendelegasian otoritas tim yang diarahkan secara langsung dalam menjalankan pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat dan mengurangi keterlambatan yang biasanya mungkin muncul pada struktur organisasi tradisional. Pemanfaatan memungkinkan proses desentralisasi dan mekanisme kerja kolaboratif dalam pengambilan keputusan dan otoritas yang secara stimultan dapat mendukung kendali sentralisasi.

Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, sistem informasi istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya untuk penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi dalam mendukung proses kerja.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa sistem informasi sebagai tipe khusus dari sistem kerja. Sistem kerja adalah suatu sistem di mana manusia dan/atau mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan/atau jasa bagi pelanggan. Sistem informasi komunikasi adalah suatu sistem kerja yang kegiatannya ditujukan untuk pengolahan (menangkap, transmisi, menyimpan, mengambil, memanipulasi dan menampilkan) informasi.

Ketika era globalisasi mengharuskan lembaga pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan publik. Pada kurun waktu satu dasawarsa terakhir pasca otonomi daerah, ada beberapa pemerintah kabupaten kota yang mencuat ke permukaan karena komitmennya menerapkan perangkat TIK tersebut. Meski demikian tidak lantas pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat berhasil seperti penerapannya. Namun ada beberapa hasil riset yang memaparkan dan memberikan fenomena mengapa suatu lembaga pemerintah berhasil maupun tidak berhasil mengelola e-goverment. beberapa riset tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK di dalam pengelolaan pemerintah masih kurang efektif. Secara garis besar budaya berteknologi ketika memberikan layanan publik mereka belum mampu mengubah paradigma kinerja mereka. Temuan riset perangkat TIK sebagai penunjang e-goverment belum efektif dimanfaatkan sesuai fungsinya. Rendahnya SDM, budaya kerja organisasi masih mendominasi. Kelemahan tersebut karena SDM atau pegawai negeri sipil belum banyak memahami bagaimana pentingnya kemampuan dalam penguasaan ICT.

Mengingat pentingnya kemampuan dan penguasaan ICT ini, maka peningkatan kualitas SDM kepegawaian merupakan salah satu prioritas utama dalam tahapan pengembangan *e-government*.

Seperti halnya sistem informasi dalam pemerintahan. sistem Kepegawaian di pemerintahan bertujuan untuk melancarkan tugas organisasi dan menjadi unsur pendukung pelaksanaan fungsi dari manajemen sebuah organisasi, demi keberadaan dan kelancaran aktivitas administrasi.

Pengelolaan kepegawaian yang bersifat manajerial maupun teknis administratif selalu berhubungan dengan data, dalam bentuk yang tercetak maupun data elektronik. kegiatan administrasi kepegawaian akan berpengaruh pada keadaan data perorangan pegawai maupun keseluruhan.  Seringkali perubahan–perubahan yang terjadi tidak segera diketahui para pelaksana administrasi yang lain. keberadaan perangkat komputer tidak banyak membantu karena data disimpan dan dikelola oleh masing-masing pelaksana dan tidak ada kesatuan plaltformdalam penyimpanannya. Akibatnya dalam hal data pokok sekalipun, bisa perlu waktu lama untuk menemukannya bahkan terjadi kesalahan.

Perubahan Pengelolaan informasi kepegawaian dari cara manual ke pengelolaan informasi kepegawaian secara elektronik berbasis web tentu juga memberikan kendala tersendiri bagi Instansi yang menangani pengelolaan pegawai dalam satu daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Perka BKN No. 19 mengenai Program e-PUPNS (Elektronik Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil) yang dikeluarkan pemerintah pusat tahun 2015 menjadi hal baru bagi para pengelola dan pengguna dalam hal ini BKD dan PNS yang berada di kabupaten/kota. BKD kabupaten/kota sebagai badan yang mempunyai kewenangan membutuhkan sosialisasi yang efektif untuk memperkenalkan inovasi baru ini dan PNS sebagai SDM pengguna harus pula mempunyai kompetensi yang cukup.

Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang dilakukan secara online berbasis web. untuk proses pemutakhiran data ini setiap PNS memulai dengan melakukan pemeriksaan data yang tersedia dalam database kepegawaian BKN dan selanjutnya PNS melakukan perbaikan data yang tidak sesuai serta menambahkan/melengkapi data yang belum lengkap/tersedia di database BKN.

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas maka penguasaan ICT di kalangan pegawai negeri sipil sebagai pengguna dianggap turut mempengaruhi dalam penggunaan inovasi baru yang disebut e-PUPNS ini. bagaimana BKD mensosialisasikan inovasi baru ini, faktor apa saja yang mempengaruhi penguasaan ICT pegawai di Kabupaten Barru serta bagaimanakah tingkat pengetahuan mereka tentang e-PUPNS.

Dengan masalah yang terjadi ini maka penulis menganggap hal ini penting untuk di teliti terkait masalah “*Dampak Sosialisasi Pelaksanaan e-PUPNS Tahun 2015 Terhadap Tingkat Penguasaan* ICT (Information Communication Technologi) *Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barru”****.***

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak sosialisasi pelaksanaan e-PUPNS oleh BKD di Kabupaten Barru?
2. Bagaimana tingkat penguasaan ICT (Information Communication Technologi) Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barru dalam pelaksanaan e-PUPNS?

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dampak sosialisasi pelaksanaan e-PUPNS oleh BKD di Kabupaten Barru?
2. Untuk mengetahui tingkat penguasaan ICT (Information Communication Technologi) Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barru dalam pelaksanaan e-PUPNS?

## **Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan penulisan ini dapat berguna dan memberi sumbangsih bagi seluruh pihak yang terkait, di antaranya :

### **a. Bagi Peneliti**

1. Mengetahui dampak sosialisasi pelaksanaan e-PUPNS oleh BKD di Kabupaten Barru?

2. Mengetahui tingkat penguasaan ICT (Information Communication Technologi) Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barru dalam pelaksanaan e-PUPNS.

3. Mengetahui penggunaan sistem informasi kepegawaian dalam pemanfaatannya secara langsung.

4. Menambah wawasan di dalam mengembangkan suatu sistem informasi kepegawaian.

### **b. Bagi Universitas**

1. Memperkaya ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi kepegawaian khususnya ICT.

2. Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk dijadikan referensi di bidang yang sama.

### **c. Bagi BKN dan BKD Provinsi/Kabupaten/Kota**

1. Penelitian ini biasa di jadikan dasar-dasar untuk BKN ataupun BKD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melihat masalah yang sering di alami dalam implementasi sebuah perencanaan berbasis web.

2. Dengan adanya penelitian tentang analisis kemampuan pegawai ini, maka secara tidak langsung akan memudahkan sub bagian yang membidangi perencanaan dalam membuat sebuah perencanaan serta sosialisasi dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya yang di selenggarakan oleh BKN dan BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.